

EDISI RABU / 22 April 2020

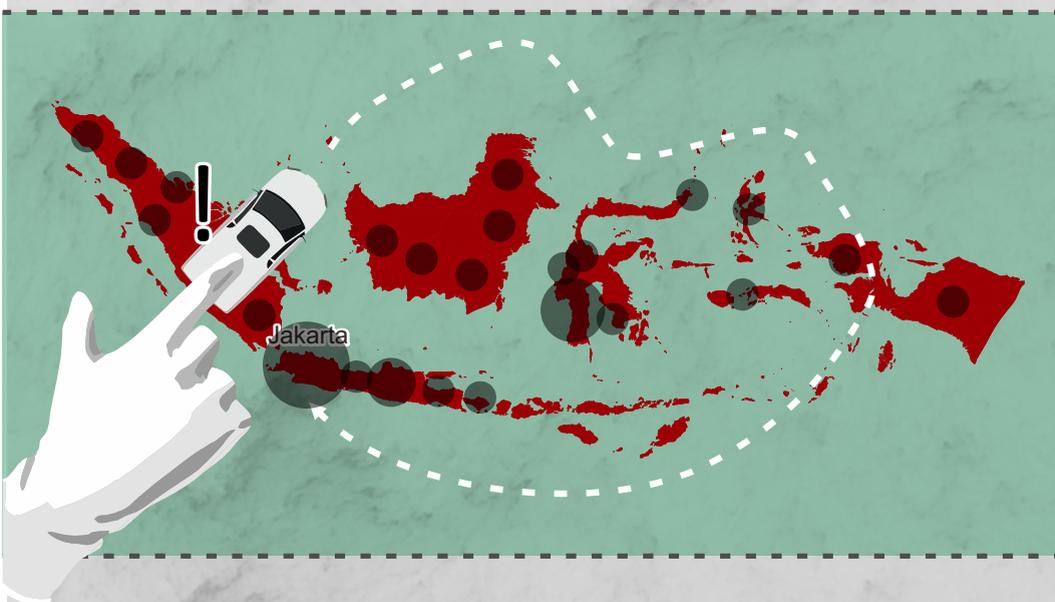
HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

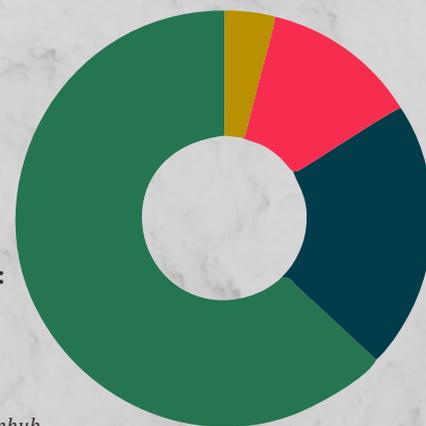
#kerendirumah

MUDIK DILARANG, 'TARING' PEMERINTAH DIUJI



PERILAKU MUDIK MASYARAKAT DI TENGAH COVID-19

- Sudah Mudik Dulu : 4%
- Berencana Mudik : 12%
- Belum Memutuskan : 21%
- Tidak Mudik : 63%



SUMBER : survei kemenhub

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan masyarakat dilarang mudik, efektif berlaku 24 April nanti. Semua warga dan kendaraan bakal tidak diperbolehkan keluar-masuk wilayah, terutama daerah yang menerapkan PSBB dan zona merah. Terkait sanksi, sesuai di UU Karantina No. 6 tahun 2018, ada ancaman penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta bagi yang melanggar. Akankah 'taring' aturan ini tajam saat pelaksanaan?

Baca hal 11

KRONOLOGI MAJU MUNDUR LARANGAN MUDIK

- **2 April 2020:** Pemerintah hanya mengimbau tak mengeluarkan larang resmi mudik
- **3 April 2020:** Mabes Polri putusan anggota dan keluarga polisi dilarang mudik
- **8 April 2020:** Kementerian PANRB memutuskan melarang ASN dan keluarga mudik
- **21 April 2020:** Presiden Jokowi resmi melarang masyarakat mudik, khususnya daerah yang menerapkan PSBB dan Zona Merah
- **24 April 2020:** Larangan mudik resmi diterapkan terutama di daerah yang sudah PSBB dan zona merah (hanya kendaraan logistic yang boleh beroperasi melewati berbagai wilayah tersebut)
- **07 Mei 2020:** Sanksi bagi yang mudik diberlakukan. Sesuai UU Karantina no 6 tahun 2018 pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	Kasus Positif	Meninggal Dunia	Sembuh
INDONESIA	7.135	616	842
SELURUH DUNIA	2.480.749	170.418	652.982

Update : 21 April 2020 Pukul 15.45 WIB
Source : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins



suasana Lumbung Pangan Jatim di Jatim Expo saat diterapkan physical distancing



Saat kerumunan warga membludak dan belum ditertibkan jarak fisiknya

SURABAYA- Hari pertama beroperasinya Lumbung Pangan Jatim di Gedung JX International, Jalan Ahmad Yani, Surabaya diserbu masyarakat, Selasa (21/4). Bahkan kondisi sempat 'ruwet' dan physical distancing disorot karena warga sempat bergerombol serta berdesakan di pintu masuk.

Media sosial mulai ramai sejak pukul 09.00, lantaran ratusan warga yang sudah 'menyerbu' terlihat mengantre di depan pintu masuk dan halaman JX. Meski mengenakan masker, mereka tetap berdesakan, tidak menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) sesuai anjuran pemerintah.

Sejatinya, panitia sudah berusaha mengatur penerapan physical distancing. Namun banyaknya warga yang menolak berdiri sambil menjaga jarak, membuat panitia kerepotan. Sehingga, untuk menghindari kerumunan massa yang lebih padat lagi, pukul 10.00 WIB Lumbung Pangan Jatim dibuka dan warga yang masuk dibuat secara bergantian untuk 40 orang.

Sesuai protokol kesehatan, setiap warga yang hendak masuk ke dalam gedung dilakukan cek suhu tubuh dengan thermal gun, serta menggunakan

LUMBUNG PANGAN JATIM DISERBU, PHYSICAL DISTANCING DISOROT!

hand sanitizer yang disediakan panitia.

Setelahnya, suasana berlangsung lebih kondusif. Panitia melakukan perubahan antrean dengan menaruh kursi berjarak satu meteran di lobi hingga halaman depan gedung JX, bahkan di kasir untuk penerapan physical distancing.

Lumbung Pangan Jatim berlangsung kurun 21 April-21 Juli 2020 dan menjadi program Pemprov Jatim untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat jelang bulan puasa Ramadhan.

Di Lumbung Pangan Jatim, disediakan aneka sembako yang dijual dengan harga murah di bawah harga pasar. Misalnya beras kemasan lima kilogram dijual dengan harga mulai Rp 53.500 hingga 57.700. Sedangkan telur ayam bisa diperoleh warga dengan harga Rp 21.500 per kilogram, lalu untuk minyak goreng bisa dibeli dengan harga Rp 11.500 per liter, dan bawang putih dijual dengan harga Rp 21.000 per kilogram.

Lastri, salah satu warga yang ikut mengantre, mengaku antusias dengan dibukanya pasar murah yang disediakan oleh Pemprov Jatim. Sebab ditengah pandemi seperti ini sembako lebih mahal. "Untuk itu saya kesini, kan lumayan mbak lebih bisa hemat. Untung tidak cuman satu hari. Tetapi selama dua bulan kedepan. Tapi ya gitu antreannya luas biasa," ujarnya saat diwawancarai setelah belanja.

Terpisah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan memang sejak pagi sudah banyak massa yang mendatangi lumbung pangan. Dia mengatakan hal itu karena ada yang

menghembuskan kabar kalau di tempat itu ada pembagian sembako gratis. "Lumbung pangan jatim memang baru di launching sore, tapi sejak pagi jam 10.00 sudah buka. Dan diserbu karena ada isu itu" katanya.

Bisa Online

Selain berbelanja langsung ke Jatim Expo, ada cara berbelanja lain di Lumbung Pangan Jatim ini, yakni berbelanja melalui online dengan layanan gratis ongkos kirim dengan radius 20 kilometer serta berbelanja dengan sistem drive thru melalui sistem preorder.

Direktur PT Panca Wira Usaha (PWU) Erlangga Satriagung memastikan layanan online ini bebas ongkos kirim untuk radius 20 kilometer. "Untuk pembelian secara online, kita memiliki website www.lumbungpanganjatim.com. Hanya dengan pesan belanja di sini, ongkirnya gratis maksimal jarak 20 kilometer," kata Erlangga. Saat dicek ke websitenya, tertulis bila pemesanan online tiap harinya berlangsung pukul 10.00 hingga 12.30 WIB saja.

Selain itu juga bisa memanfaatkan layanan Go Shop lewat fitur aplikasi Gojek. Akan tetapi jika membeli di sana tidak bisa memanfaatkan layanan bebas ongkir. Layanan drive thru juga ada dengan sistem preorder dan bisa janji antar pembeli dan penjual kapan akan diambil sehingga saat mengambil tidak perlu turun dari kendaraan. Untuk komunikasi ini sudah disiapkan call center dan customer service sebagai layanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pre order. (ufi,ard)

WABAH COVID-19

DUH! STOK RAPID TEST BLITAR RAYA MENIPIS



Hasil Rapid Test 11 ODP yang dikarantina di Kab Blitar negatif Covid-19

Blitar - Stok rapid test di wilayah Blitar Raya mulai menipis. Kondisi ini dikhawatirkan potensi membuat pelaksanaan tes terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 tak optimal.

Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Kuspardani ketika dikonfirmasi mengenai ketersediaan stok alat rapid test dan reagen, mengakui kalau jumlahnya belum aman. "Kalau ditanya stoknya memang belum aman, tapi masih ada tidak sampai kosong," tutur Kuspardani, Selasa (21/4).

Dijelaskan Kuspardani jika pasokan Rapid Test diperkirakan akan datang dalam minggu ini, karena pihaknya sudah pesan ke produsen. "Semoga tepat waktu, sehingga tidak mempengaruhi tindakan penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Blitar," jelasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Blitar, dituturkan Plt Walikota Blitar, Santoso jika stok Rapid Test memang

menipis. "Informasi dari petugas media gugus tugas, saat ini ada sekitar 80 Rapid Test," kata Santoso.

Bahkan persediaan tersebut, seharusnya diperuntukan untuk tenaga medis yang menangani kasus Covid-19. "Karena kondisi tenaga medis, apalagi yang pernah menangani pasien positif Covid-19 harus dites," tandasnya.

Ditambahkan Santoso pihaknya melalui Dinkes sebenarnya sudah berusaha melakukan pembelian, karena anggaran juga sudah disediakan. Tapi kendalanya, saat ini sulit untuk mendapatkan barangnya. "Uangnya sudah ada, tapi barangnya yang sulit" pungkasnya. (ais)

DPR RI NILAI **LARANGAN MUDIK** JOKOWI TEPAT

Jakarta – Meski sempat terkesan maju-mundur, tapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik lebaran dinilai DPR RI sangat tepat. Aturan pulang kampung ini diyakini bisa memutus rantai penularan Covid-19.

"Kita dukung langkah pemerintah karena peraturannya tegas dan tidak abu-abu. Ini memastikan supaya episentrum di kota-kota terutama Jakarta jangan menyebar secara luas ke desa," kata Anggota DPR dari FPKB Marwan Jafar, Selasa (21/4).

Marwan yang pernah menjabat Mendes PDT menilai penyebaran corona di daerah banyak disumbang warga yang mudik sebelum aturan dibuat. Langkah Jokowi dinilai efektif mengerem laju penyebaran corona. "Karena mudik diam-diam menyebabkan di desa-desa mulai banyak yang tertular. Kita apresiasi ini," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak setelah aturan ditetapkan. Terutama dampak sosial yang mungkin muncul. "Bantuan yang sudah disiapkan diarahkan tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mudik ini. Untuk menghindari dampak sosial. Mudik ini kan ritual sakral, ketika masyarakat pekerja harian yang dilarang mudik, mereka kan tidak ada income jadi harus didata dengan jelas by name by address supaya bantuannya benar-benar tepat sasaran," katanya.

"Saya menyarankan RT/RW mendata dengan jelas, jadi jangan cuma online saja

harus benar-benar ada posko kalau perlu. Karena yang tidak mudik dan tidak ada pekerjaan tetap di sektor informal itu kan banyak sekali," sambungnya.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa. "Pelarangan mudik adalah satu opsi yang bijaksana menurut saya untuk menghindari penyebaran Covid-19 ini ke desa-desa. Kita tahu bahwa di desa atau daerah-daerah tidak semuanya siap menghadapi penyebaran virus ini," katanya.

Politikus PPP itu mengutip survei LIPI yang menyebut sebagian besar atau 56,22 persen perantau di Jabodetabek bersedia tidak mudik. Namun ia mengingatkan masih ada 43,78 persen orang yang akan mudik jika tak ada larangan dari pemerintah.

Oleh karena itu, Nurhayati menyebut pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, larangan mudik bisa dimulai dengan menyetop arus transportasi dari Jabodetabek ke luar kota. "Mudik biasanya sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah lebaran. Kalau kita lihat dari kedaruratannya, pencegahan Covid-19 ini, harusnya dari sekarang sudah diberlakukan supaya orang-orang juga betul-betul tidak ada yang mudik lebih awal," tuturnya.

Dia paham bahwa keputusan melarang mudik menjadi dilema di tengah krisis. Pemerintah, ucapnya, perlu menjamin ke-



Anggota DPR dari FPKB Marwan Jafar

hidupan para perantau, terutama yang kehilangan pekerjaannya saat krisis. "Kan kalau tidak mudik di Jabodetabek, akan diberi Bantuan Presiden kan, Rp600 ribu per bulan. Jadi menurut saya, setidaknya menghadapi lebaran sudah cukup ya," ucap dia. (ist)

DPRD RAGU **KEMAMPUAN ANGGARAN** TERKAIT PSBB SURABAYA

Surabaya - DPRD Kota Surabaya ragu akan kemampuan anggaran terkait disetujuinya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pahlawan oleh pemerintah pusat. Dikhawatirkan, dana sebesar Rp 196 miliar tidak mampu menahangejolak sosial ekonomi masyarakat.

"Kami masih ragu dengan kekuatan anggaran yang diusulkan Pemkot Surabaya sebesar Rp196 miliar. Kami menilai anggaran itu tidak akan mampu menahan ketahanan sosial ekonomi masyarakat saat diberlakukannya PSBB nanti," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra A.H. Thony, di Surabaya, Selasa (21/4).

Dari anggaran tersebut, kata dia, sebesar Rp161 miliar untuk pengadaan sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnya mencapai 702.127 orang dari 227.908 kepala keluarga.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, warga terdampak yang non-MBR tentunya juga perlu menjadi perhatian Pemkot Surabaya pada saat PSBB ini dijalankan. Artinya, warga yang non-MBR men-

jadi bagian warga terdampak COVID-19 karena mereka tidak diperkenankan ber-aktivitas di luar rumah.

Untuk itu, Thony menanyakan kepastian bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait PSBB di Surabaya. "Ini perlu kepastian sebelum PSBB di Surabaya benar-benar dijalankan. Jangan sampai, begitu PSBB diterapkan, Pemkot kebingungan mendapatkan anggaran tambahannya, karena masyarakat non-MBR juga bagian dari warga yang perlu bantuan sosial ekonomi," kata Thony.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS Reni Astuti berharap penerapan PSBB yang kemungkinan bakal dilakukan di Kota Surabaya dapat berjalan efektif sehingga tidak berlangsung dalam waktu lama.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar kebijakan PSBB dilakukan dengan langkah yang tepat agar penerapannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat, yakni dengan melakukan sosialisasi dengan maksimal, kesiapsiagaan



Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra A.H. Thony

pemerintah dan kedisiplinan masyarakat.

"Jadi misalkan berjalan dua pekan ada hasilnya kurva pandemi menurun dan tidak diperpanjang. Ya kuncinya kesiapsiagaan pemerintah kota dan kedisiplinan masyarakat. Makanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting termasuk pengaman kebutuhan dasar warga selama penerapan berlangsung harus terpenuhi dengan tepat," ujarnya.

Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan Pemkot Surabaya sudah melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 196 miliar atau tepatnya Rp 196.408.341.686 yang bersumber dari pos belanja tidak terduga Rp 12,5 miliar dan belanja langsung Rp 184 miliar. "Anggaran ini untuk penanganan COVID-19 selama April dan Mei 2020," katanya. (ard,ist)

DAMPAK COVID-19 KOTA MADIUN

PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN MALAM DIPERPANJANG TANPA BATAS WAKTU

Madiun- Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun memastikan masa libur Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Madiun, diperpanjang tanpa batas waktu. Hal ini dilakukan karena lokasi itu identik dengan kerumunan massa, yang potensial menjadi pusat penularan virus corona.

Berdasarkan surat edaran (SE) pertama, masa penutupan THM tersebut diketahui hanya berlaku sampai 29 Maret lalu. Namun, walikota melihat dengan kondisi saat ini belum memungkinkan untuk pembukaan kembali.

"THM itu kan tempat untuk mengisi waktu longgar, identik dengan tempat bersenang-senang. Padahal saat ini kita sedang prihatin. Makanya masa tutupnya kita perpanjang. Batas waktunya belum ditentukan," kata Wali Kota Madiun, Maldi, Selasa (21/4).

Maldi menambahkan penutupan ini dirasa merupakan kebijakan yang tepat. Ia menilai meskipun THM tetap dibuka, pelanggan yang datang juga minim, lantaran saat ini masyarakat lebih memilih beraktivitas di rumah.

"Ini merupakan upaya untuk menjaga masyarakat Kota Madiun. Sudahlah, tidak usah berhura-hura dulu. Lebih baik waktu digunakan untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. Apalagi, sebentar lagi bulan



Walikota Madiun, Maldi

puasa," imbuhnya.

Mantan Sekda Kota ini menandakan, kebijakan ini ada pengecualian bagi restoran atau tempat usaha bidang kuliner. Walikota masih memperbolehkan buka sampai pukul 21.00 WIB. Restoran penting untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakat. Begitu juga toko-toko kebutuhan yang juga masih diperbolehkan buka.

"Tempat makan masih boleh, tapi waktunya kita batasi dan tidak menyediakan meja dan kursi. Ini kan untuk urusan perut yang harus terus dicukupi," pungkasnya.

Siswa Hingga 29 Mei

Sementara, kegiatan belajar dari rumah atau learning from home (LFH) jika sebelumnya SE terkait itu berakhir 21 April, kini diperpanjang hingga 29 Mei mendatang.

Hal itu sesuai Surat Edaran Walikota

Madiun terkait perpanjangan peningkatan kewaspadaan Covid-19 tertanggal 16 April 2020. Sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No 420/2438/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Timur.

Wali Kota Madiun, Maldi mengatakan, kebijakan tersebut linier dengan instruksi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemrov Jawa Timur. Kebijakan itu dapat berubah jika ada instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Kebijakan belajar di rumah kan sebelumnya sampai tanggal 21 April, kita undur lagi. Karena walaupun Kota Madiun tidak penerapan sosial berskala besar (PSBB) tetapi yang sifatnya linier (dari pemerintah pusat dan Pemrov Jatim) kita diperintah ya kita lakukan," ungkapnya.

Dengan diterapkannya kebijakan itu, ia menghimbau seluruh siswa tetap belajar dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada. Pun pemkot juga telah memasang akses internet gratis di setiap RT, sehingga dapat mempermudah interaksi antara guru dengan siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran maupun ilmu pengetahuan. (Sur)

SEMANGAT KARTINI KALA PANDEMI CORONA

KETUA PKK KAB. PASURUAN BAGIKAN MASKER HINGGA HAND SANITIZER

Pasuruan- Bertepatan dengan Hari Kartini yang diperingati tiap tanggal 21 April, Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan serentak turun ke masyarakat, untuk membagikan masker, hand sanitizer dan jamu tradisional secara gratis.

Seperti yang terlihat di Pasar Gondangwetan, Selasa (21/04/2020) pagi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Lulis Irsyad Yusuf ikut blusukan sampai ke sudut-sudut pasar. Bersama anggota PKK, Lulis mensosialisasikan pentingnya melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat). Selain itu dia juga mengimbau agar masyarakat mematuhi seluruh anjuran pemerintah dalam memerangi Covid-19 atau Virus Corona.

Dengan berjalan kaki, istri Bupati Irsyad Yusuf itu membagikan masker, hand sanitizer dan jamu tradisional yang dibuat sendiri. Sasaran kegiatan mulai dari pedagang, tukang ojek, tukang parkir, maupun pembeli dan masyarakat umum yang melintas di sekitar pasar tersebut.

Menurut Lulis, kesadaran masyarakat untuk minimal memakai masker saat berada di luar rumah masih rendah. Sepanjang dirinya blusukan ke pasar tersebut, hanya ada 1 atau 2 orang yang memakai masker.

Itupun hanya pembeli yang mungkin sudah memahami bagaimana langkah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di sekitar tempat tinggal mereka.

"Saya tadi keliling, dan lebih banyak yang gak pakai masker. Tadi saya kasih, tapi ya ada yang tidak langsung dipakai. Katanya gerah lah, ampek (Jawa: tak bisa bernafas dengan mudah) atau malas. Makanya saat memberi masker, sekalian saya jelaskan pentingnya masker itu," katanya.

Dengan pembagian masker, hand sanitizer dan jamu tradisional ini, Lulis berharap agar dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan Covid-19. "Contohnya kita kasih botol jamu yang sudah kita tulis jahe, temulawak, kencur dan sereh. Nah ketika diminum sudah habis, maka bisa dibuat lagi. Karena jamu ini adalah ramuan kita bersama. Dan bahan-bahannya melimpah di sekitar kita," jelasnya.

Lebih lanjut Lulis menegaskan, selain dibagikan kepada masyarakat, Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan juga menyerahkan bantuan APD (alat pelindung diri) bagi para petugas medis yang menangani PDP (pasien dalam pemantauan) maupun yang sudah berstatus Positif Covid-



Ketua PKK Kab. Pasuruan, Lulis Irsyad Yusuf Bagikan Masker hingga Hand Sanitizer kepada masyarakat

19 di Kabupaten Pasuruan.

Bantuan tersebut sudah diserahkan oleh Lulis dan diterima secara simbolis oleh Dr Ani Latifah selaku perwakilan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, di Posko Covid-19. Pihaknya berharap, semoga bantuan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya selama Pandemi Covid-19.

"Kami tergerak karena memang hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Saya ingin menyampaikan bahwa perempuan juga ikut melawan Covid-19. Para dokter, perawat, surveillance dan petugas medis banyak yang perempuan. Garda yang paling depan sebenarnya adalah diri kita sendiri, jadi semua harus sadar dan patuh," tegasnya. Untuk itu, dalam momen Kartini tahun 2020 ini, Lulis mengajak para ibu untuk menjaga suami dan anak-anaknya dari penyebaran Covid-19. (ist)

40 PERJALANAN KERETA DISTOP, PT KAI GENJOT BISNIS CARGO

Blitar - Menurunnya okupansi penumpang dan dibatalkannya 40 perjalanan kereta api, dampak dari wabah Virus Corona (Covid-19) otomatis membuat operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersendat. Menyikapi hal tersebut, terobosan bisnis cargo atau pengiriman barang pun digenjut melalui Rail Express. Layanan ini menawarkan pengiriman barang melewati 60 stasiun yang ada di sepanjang jalur kereta.

"Masyarakat selama ini mengenal angkutan barang yang ada di kereta api hanya untuk barang atau paket besar-besarnya saja, padahal selama ini sudah banyak yang memanfaatkan angkutan barang di kereta untuk mengirimkan komoditi lain seperti bahan makanan, sembako, obat-obatan, hingga paket dokumen," ujar Manager Humas Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko, Selasa (21/4).

Di tengah wabah corona, PT KAI pun makin gencar mempromosikan layanan cargonnya. Ixfan menjelaskan, PT KAI melalui Rail Express menyediakan layanan angkutan barang Station to Station (dari

stasiun ke stasiun) dengan harga terjangkau. Layanan tersebut telah tersedia di 60 stasiun yang berada di beberapa kota dan kabupaten di Pulau Jawa.

Diakuinya, kondisi seperti saat ini BUMN memang dituntut untuk kreatif dan bisa melakukan terobosan layanan. Meski layanan penumpang dihentikan, PT KAI memastikan operasional kereta barang tetap berjalan dan tak ada hambatan. "Intinya untuk pengiriman barang kami layani penuh," tuturnya.

Seperti diketahui, sesuai Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, disampaikan perusahaan transportasi logistik untuk bahan pangan masih dapat beroperasi tanpa pembatasan. "Seperti pada 9 April 2020 kemarin, kita angkut 4,6 ton telur dengan kereta bagasi dari Blitar ke Jakarta," jelas pria penghobby olah raga sepeda ini.

Diungkapkannya selama Maret 2020 ini, angkutan barang retail atau yang menggunakan kereta bagasi mengalami kenaikan



Jasa pengiriman barang melalui layanan PT KAI Rail Express meningkat di saat pandemi corona

sekitar 4 persen. Dibanding dengan Februari di tahun yang sama, yaitu dari 11.000 ton menjadi 12.000 ton.

"Karena tingginya minat masyarakat menggunakan jasa Rail Ekspres untuk mengirimkan barangnya ke beberapa daerah di Pulau Jawa, maka mulai 11 April kemarin dijalankan KA Parcel lintas tengah," ungkap Ixfan.

Ditambahkan Ixfan, bila sebelumnya KA Parcel yang berisikan kereta bagasi hanya berjalan dari Bandung - Surabaya Gubeng PP, maka mulai 11 April 2020 dijalankan KA Parcel lintas tengah juga beroperasi dari Jakarta Gudang tujuan Malang. Kereta tersebut berhenti di beberapa stasiun yaitu Stasiun Purwokerto, Lempuyangan, Purwosari, Ngawi, Madiun, Kediri, Blitar dan berakhir di Stasiun Malang. (ais)

TAHFIDZ ONLINE JADI TREN RAMADAN SAAT PANDEMI CORONA

Surabaya- Aturan social dan physical distancing (jaga jarak sosial dan fisik, Red) saat corona masih mewabah mendorong kegiatan berbasis dalam jaringan (daring) menjadi tren di masyarakat. Work From Home (WFH) hingga belajar dari rumah pun memanfaatkan berbagai teknologi online ini. Menjelang Ramadan, belajar membaca dan menghafal Al Quran pun bisa dilakukan secara online.

"Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat tidak lagi bisa mengikuti sholat tarawih dan ceramah di masjid secara langsung. Kegiatan belajar mengaji dengan tatap muka fisik, juga tak lagi ada. Tapi bukan berarti kualitas ibadah kita berkurang," ujar Wirawan Dwi, Humas Griya Al Qur'an, Selasa (21/4).

Diakui Wirawan, peran orangtua memang menjadi lebih besar saat menjalani Ramadan di tengah virus Covid-19 seperti saat ini. Seorang ayah tiba-tiba harus siap menjadi imam sholat jamaah dan tarawih yang tentu saja harus siap dengan banyak hafalan Al Qur'an. Tiba-tiba seorang ibu harus menjadi guru mengaji bagi anak-anaknya. "Saat orangtua bisa tidak akan menjadi masalah. Tapi bila ragu, saat ini banyak lembaga-lembaga yang juga menyediakan kajian hingga belajar membaca dan menghafal Al Quran secara gratis," katanya.

Dikatakannya, Griya Al Qur'an pun memiliki Program Tahfidz Online, yang bisa diikuti semua umat Islam secara gratis selama 3 hari. Kegiatan ini akan membagi

metode menghafal Al Quran yang mudah diaplikasikan untuk usia dewasa.

"Kami memberi nama metode ini dengan 'Metode Sahabat Tahfidz Griya Al Quran. Metode ini memang sudah dikemas agar memudahkan menghafal Al Quran untuk usia dewasa yang sudah diteliti, dan diujikan sebagai disertasi Program S3 Ustadz Bairus Salim, salah satu tim Riset and Development Griya Al Qur'an. Metode ini juga sudah diaplikasikan di kelas-kelas tahfidz Griya Al Qur'an," jelasnya.

Dalam kegiatan ini, 1.100 peserta akan dilatih menghafalkan 10 ayat dari Surat Al Kahfi. "Sebuah hadis Sahih Muslim berbunyi : ...Barangsiapa yg hafal sepuluh ayat dari ayat awal surah Al-Kahfi, ia akan terpelihara dari godaan Dajjal dan dalam riwayat lain, siapa yg hafal sepuluh ayat yg terakhir daripadanya... Jadikami berharap 10 ayat itu menjadi bekal untuk menghafal surat dan ayat-ayat Al Quran yang lainnya,"katanya.

Dalam pelaksanaan Program Tahfidz Online ini, Griya Al Qur'an menyiapkan sebanyak 15 pengajar hafidz yang akan mengawal 1100 peserta. Peserta nanti akan tergabung dalam grup-grup WhatsApp yang masing-masingnya dikawal oleh tim Griya Al Qur'an yang kita sebut musyrif. Dalam grup WA, musyrif akan mengirimkan rekaman suara bagaimana metode menghafal Al Quran yang mudah kepada peserta. Lalu, peserta diberi waktu untuk menghafal dan kemudian menyetorkan



Sekitar 1.100 peserta mengikuti Program Tahfidz Online yang digelar Griya Al Qur'an

hafalannya secara pribadi ke nomor musyrif yang ditunjuk, sehingga masing-masing peserta akan merasa didampingi secara personal oleh pengajar Griya Al Qur'an.

Program yang digelar selama 3 hari, mulai Selasa hingga Kamis (21-23/4) ini, disambut baik oleh masyarakat. Peserta yang terdaftar sebanyak 1100 orang yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta dari luar negeri pun turut bergabung, mereka berasal dari Malaysia, Jepang, Inggris dan Amerika.

Dalam kegiatan ini, Griya Al Qur'an membatasi usia minimal pesertanya, yaitu mulai 15 tahun hingga tidak terbatas usianya. Peserta yang sudah terdaftar, paling muda di usia 15 dan paling tua berusia 77 tahun. Dari 1100 peserta itu ada satu di antaranya yang difabel dengan gangguan kesulitan berbicara. Ia secara khusus mengajukan diri untuk bisa menjadi peserta kegiatan itu. "Semoga program ini mendekatkan keluarga dan menguatkan secara psikologis dan teologis dalam menghadapi dan melawan virus yang sangat mudah penularannya ini," tutupnya. (ist)



*Melati dan
Isabel Wijzen*

MENYELAMATKAN BALI DARI PLASTIK

Jauh sebelum kehebohan Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia, berhasil menggerakkan jutaan orang untuk mulai menganggap serius masalah perubahan iklim pada tahun 2018, dua kakak beradik asal Bali telah aktif menggerakkan massa agar tidak menggunakan plastik sekali pakai.

Melati Wijsen (19) dan Isabel Wijsen (17) yang saat itu masih berusia 12 dan 10 tahun lantang bersuara di tengah-tengah hiruk pikuk wisatawan di pantai-pantai di Bali untuk mulai meninggalkan kantong plastik melalui gerakan BBPB, pada tahun 2013. Tujuannya hanya satu, menjadikan kampung halamannya tersebut bebas plastik.

“Lahir dan besar di Bali, alam selalu ada di sekitar kami. Ketika kami sadar semua polusi plastik, kami tidak percaya ini sesuatu yang terjadi pada rumah kami. Seseorang harus melakukan sesuatu. Jadi, kami mengambil tindakan dengan memulai BBPB (Bye Bye Plastic Bag) tanpa rencana, hanya karena kami ingin melindungi rumah kami,” kenang Melati, seperti dikutip dari laman Femina.

BBPB adalah sebuah gerakan yang mengajak wisatawan maupun orang lokal di Bali untuk bersih-bersih sampah plastik. Tak hanya bergerak dalam kegiatan bersih-bersih sampah plastik di pesisir pantai di Bali.

Lebih kompleks, lembaga swadaya masyarakat yang dibangun oleh Wijsen

bersaudari ini memiliki beberapa proyek lainnya. Mulai dari mengedukasi tentang pengelolaan sampah, workshop, hingga mengajarkan tentang bahaya sampah plastik di sekolah di seluruh Indonesia.

Termasuk menjadi host untuk acara tahunan pembersihan pantai terbesar di Bali yang melibatkan 12.000 orang.

Walau dijalankan oleh dua gadis remaja, BBPB telah memberikan dampak yang besar pada perubahan gaya hidup masyarakat di sekitar mereka di Bali.

“Setelah enam tahun melakukan kampanye, kami melihat banyak perubahan. Tingkat kesadaran terus tumbuh hingga hari ini. Kami telah berbicara dengan lebih dari 75.000 orang di seluruh dunia dan membuat dua buklet pendidikan yang digunakan di SD-SD di seluruh Indonesia,” tutur Isabel.

Untuk menunjukkan keseriusannya tentang dampak yang buruk plastik bagi alam, Melati dan Isabel pernah mogok makan pada 2014. Hal nekat ini sengaja dilakukan keduanya untuk menarik perhatian pemerintah daerah Bali. Orang tua, teman, dan guru keduanya sempat khawatir dan meminta mereka untuk menghentikan niat tersebut..

Hebatnya, dalam waktu 24 jam Melati dan Isabel bisa bertemu dengan Gubernur Bali, I Wayan Koter. Dan akhirnya, apa yang diperjuangkan oleh keduanya berbuah manis: 1 Januari 2019 mulai berlaku Peraturan

Gubernur No.97 yang melarang penggunaan plastik sekali pakai di toko-toko retail di Bali.

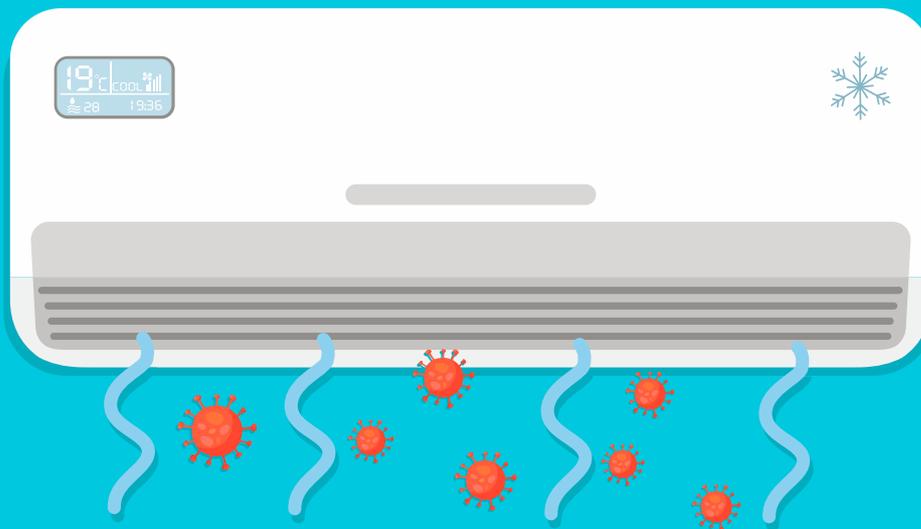
Diakui keduanya, ini adalah salah satu buah hasil yang membanggakan atas apa yang dilakukan BBPB selama ini. Namun masih ada pekerjaan rumah yang besar bagi pemda Bali untuk mengatasi permasalahan sampah.

Seperti penuturan Melati bahwa Bali masih belum memiliki sistem pengolahan sampah yang efisien, mengingat hanya kurang dari 5 persen yang didaur ulang. Sementara sisanya, sampah plastik berakhir di pembuangan, sungai hingga lautan. Diakui Wijsen bersaudari, bahwa permasalahan ini juga jadi goal BBPB ke depannya.

Menjadi muda tak selamanya memberikan keuntungan, karena diakui keduanya di awal-awal gerakan tersebut banyak orang yang kerap meremehkan apa yang mereka lakukan bersama BBPB.

“Ketika kami memulai, sulit untuk meyakinkan orang bahwa kami serius. Kebanyakan orang hanya melihat kami dua gadis menggemaskan yang inspiratif di Bali. Namun pada akhirnya kegigihan dan komitmen serta rekam jejak selama enam tahun membuktikan bahwa kami serius,” papar Melati yang kini memiliki lebih dari 50 tim di seluruh dunia yang dipimpin oleh anak muda. Mulai dari Australia, Spanyol, Swiss, hingga Yunani (Ist).





FAKTA BARU, UDARA AC PICU PENYEBARAN VIRUS CORONA

Para ilmuwan menemukan fakta baru terkait penyebaran virus corona atau COVID-19. Dikatakan bahwa pendingin udara atau air conditioner (AC) menjadi salah satu media penyebaran virus yang menyerang saluran pernapasan ini.

Fakta ini dikemukakan melalui studi yang diterbitkan di situs web Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan disetujui oleh Komite Etika Pusat Pengendalian Penyakit Guangzhou.

Para ilmuwan meneliti 10 orang dari 3 keluarga yang makan di sebuah restoran pada saat yang sama di Guangzhou, China.

Menurut penelitian yang dilakukan dari 26 Januari hingga 10 Februari 2020, 10 orang itu terjangkit virus corona melalui AC yang ada di restoran tersebut.

Diketahui satu keluarga yang ada di restoran tersebut baru saja bepergian dari Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dua keluarga lainnya duduk berdekatan dengan keluarga tersebut.

Pada hari itu, pasien pertama mengalami demam dan batuk lalu pergi ke rumah sakit. Pada 5 Februari, sembilan lainnya dari tiga keluarga dinyatakan terinfeksi virus corona.

Oleh karena itu, studi yang dilakukan para ahli di China menyatakan bahwa virus

corona yang menginfeksi 10 orang itu bermula saat makan di restoran tanpa jendela dan sirkulasi udara mayoritas menggunakan AC.

Dari 83 pelanggan pada hari itu, 73 orang lainnya diidentifikasi sebagai orang dalam pengawasan dan dikarantina selama 14 hari.

Diprediksi tetesan (droplet bersin dan batuk) dari orang yang terinfeksi bertahan di ruangan ber-AC itu dalam beberapa waktu dan merambat ke meja terdekat. Para peneliti menyimpulkan bahwa transmisi tetesan didorong oleh ventilasi ber-AC, dan faktor kunci untuk infeksi ada-

lah arah aliran udara.

"Jarak antara pasien (terinfeksi) dan orang-orang di meja lain semuanya kurang dari satu meter. Namun aliran udara yang kuat dari AC bisa merambatkan tetesan dari meja ke meja," tulis laporan dalam studi itu.

Selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of American Medical Association, menemukan jejak virus corona di saluran udara rumah sakit.

"Tetesan kecil yang sarat virus dapat dipindahkan oleh aliran udara dan disimpan pada peralatan seperti ventilasi," tulis laporan tersebut (Ist).



"Tetesan kecil yang sarat virus dapat dipindahkan oleh aliran udara dan disimpan pada peralatan seperti ventilasi,"

Laporan Penelitian di Situs Web CDC

APAKAH BENAR SINAR ULTRAVIOLET DAPAT MEMBUNUH VIRUS CORONA?

Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi bahwa sinar ultraviolet atau UV dapat membunuh virus corona Covid-19. Menurut badan Kesehatan dunia World Health Organization (WHO), belum ada sinar UV, termasuk UVC, yang bisa membunuh virus corona.

Lampu sinar UV yang biasanya digunakan sehari-hari, ternyata malah menyebabkan kulit teriritasi. Bahkan, sinar UV ini berisiko menimbulkan efek penuaan dan keriput pada kulit. Bahkan, UVA merupakan sinar UV yang bisa “membangunkan” sel kanker di dalam kulit Anda.

Sinar UV terbagi menjadi tiga jenis, yang meliputi UVA, UVB, dan UVC. UVA mendominasi sekitar 95 persen sinar UV yang masuk ke dalam bumi. UVA dapat berpenetrasi hingga ke dalam kulit. Biasanya, UVA lah yang menyebabkan perubahan warna kulit.

UVB adalah sinar UV yang aktif secara biologis. Sama seperti UVA, sinar UV ini juga menyebabkan perubahan warna kulit dan luka bakar. Namun, dampaknya

tidak secepat UVA. Sinar UV ini juga bisa menyebabkan penuaan dan keriput pada kulit.

Tidak hanya itu, UVB juga bisa meningkatkan risiko kanker kulit. Sebagian besar UVB dari matahari disaring oleh atmosfer, sebelum akhirnya masuk ke dalam bumi.

Sedangkan UVC adalah sinar UV yang paling mengerikan, karena mampu memberikan kerusakan terbesar pada kulit. UVC dapat berpenetrasi ke dalam lapisan kulit paling dalam.

Sinar UV ini difilter oleh atmosfer dan tidak dapat mencapai permukaan bumi. Sinar UVC inilah yang dianggap mampu membunuh virus corona.

Apakah sinar matahari dapat membunuh virus corona?

Jika UVC belum terbukti ampuh membunuh virus corona, bagaimana dengan “saudaranya”, si UVA dan UVB? Jawaban singkatnya, mungkin saja.

Namun, Anda disarankan untuk tidak menggantungkan cara pencegahan virus

corona pada keduanya. Sebab, para peneliti belum mengetahui waktu yang dibutuhkan UVA dan UVB untuk bisa membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita.

Sebuah studi pada SARS, membuktikan, tidak ada efek apa-apa dari sinar UVA saat diekspos ke kulit selama 15 menit. Namun sayangnya, studi itu tidak mencoba sinar UVA lebih dari 15 menit. Selain itu, sinar UVB juga tidak masuk ke dalam uji cobanya.

Kesimpulannya adalah, klaim sinar UV dapat membunuh virus corona, masih mitos dan membutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikannya. Mengingat studi ini masih terbatas pada hewan uji saja, maka jangan asal percaya dengan mitosnya.

Dibandingkan mencoba hal-hal yang belum pasti, lakukan saja cara pencegahan virus corona yang sudah terbukti. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, siapkan selalu hand sanitizer, gunakan masker jika keluar rumah, dan lakukan physical distancing! (Ist)



BERJEMUR PAKAI TABIR SURYA, EFEKTIFKAH SERAP VITAMIN D?

Berjemur untuk mendapatkan asupan vitamin D diyakini mampu meningkatkan daya tahan tubuh menangkal virus Covid-19. Tapi ada kekhawatiran sinar matahari bisa memicu masalah kulit. Jadi, wajibkah memakai tabir surya saat berjemur?

Berjemur di bawah sinar matahari langsung pada waktu dan durasi tertentu bisa membawa manfaat bagi kesehatan. Salah satunya mendapatkan Vitamin D yang bermanfaat meningkatkan fungsi sel kekebalan tubuh. Untuk mendapatkan Vitamin D, kita memerlukan paparan sinar ultraviolet B yang muncul antara Pukul 09.30 - 14.30. Pada umumnya, waktu yang diperlukan untuk berjemur pada sekitar jam 10 pagi atau 3 sore adalah 15-20 menit.

Namun, beberapa orang, terutama perempuan, khawatir kulitnya akan terbakar dan hitam jika terlalu lama terpapar matahari. Sebagian memilih mengaplikasikan produk tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, apakah pengguna tabir surya tetap mendapatkan Vitamin D dari berjemur?

Konsultan Alergi dan Imunologi Anak, Prof. DR. Dr. Budi Setiabudiawan, Sp.A(K), M.Kes menjelaskan, kita harus mampu membedakan seperti apa paparan ultraviolet

A (UVA) dan ultraviolet B (UVB). Paparan sinar UVA, lanjut Budi, tidak tertahan oleh kaca, baju dan permukaan lainnya. Namun, berbeda dengan UVB. "Jadi (UVB) harus langsung di bawah sinar matahari," katanya dalam IG Live bersama IDAI.

Ia menambahkan, dengan durasi berjemur 15-20 menit, sinar matahari perlu mengenai 20-30 persen bagian tubuh anak-anak dan dewasa. Jumlah itu sama dengan keseluruhan tangan dan kaki. "Dua lengan penuh depan belakang itu 20 persen, kalau kaki hampir sekitar 36 persen. Jadi hanya tangan dan kaki saja sudah cukup terpapar. Pakai celana pendek, baju tangan pendek cukup tidak perlu seluruh tubuh," ungkapnya.

Oleh karena itu, tabir surya boleh digunakan pada wajah untuk mencegah kulit terbakar. Namun, usahakan tangan dan kaki tetap terpapar. Bahkan, untuk mencegah cahaya yang terlalu silau, kita juga diperbolehkan menggunakan kacamata hitam. "Jangan seluruh badan (pakai tabir



surya), karena nanti enggak ada bagian yang terpapar ultraviolet B," kata Budi.

Namun, dalam memilih tabir surya, Budi mengingatkan agar kita memilih produk dengan kandungan 15-50 SPF dan digunakan setidaknya 30 menit sebelum berjemur untuk fungsi yang optimal.

Jadi, jangan semua badan ya tabir suryanya, cukup wajah saja!.(Ist)

Mudik Dilarang (dari hal 1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang pulang kampung atau mudik saat Lebaran 2020. Larangan ini, disebut Jokowi, berlaku bagi semua masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona baru (Covid-19).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/4).

Jokowi meminta jajarannya menyiapkan semua hal berkaitan dengan keputusannya itu. Larangan mudik sebelumnya disampaikan Jokowi untuk aparat sipil negara (ASN) serta TNI/Polri, kini keputusannya itu mencakup semuanya.

Salah satu pertimbangan Jokowi adalah hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang mengatakan, warga yang tidak mudik sebesar 68 persen, yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen. "Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi. Apalagi, bansos sudah mulai dilaksanakan. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Prakerja sudah berjalan, minggu ini juga bantuan sosial bansos tunai juga sudah dikerjakan," katanya.

Larangan ini diterapkan di Jabodetabek, wilayah-wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan wilayah lainnya yang termasuk zona merah. Saat ini, pemerintah masih membahas skema pengawasan di jalur-jalur mudik, yang melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Korlantas Polri, dan instansi lainnya.

Meski pelarangan mudiknya mulai Jumat, 24 April, tapi sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik akan ditegakkan mulai 7 Mei 2020. Adapun salah satu sanksi yang akan diterapkan yakni menginstruksikan masyarakat yang nekat mudik untuk kembali ke kediaman atau pun daerah semula.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020, ada sanksi-sanksinya. Namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif dikerjakan mulai 7 Mei," ucapnya. Luhut menjelaskan pemerintah menerapkan sanksi secara bertahap, sehingga baru efektif 7 Mei. Pemerintah tak ingin sanksi langsung diterapkan tiba-tiba mulai hari ini.

"Kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Saya ulangi ya, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat," imbuhnya.

Sanksi tersebut diberikan kepada masyarakat yang melintas pada akses ke luar/masuk wilayah Jabodetabek dan wilayah yang menerapkan PSBB. Lalu, untuk Jalan Tol sendiri pemerintah sudah membatasi operasionalnya hanya untuk kendaraan logistik.

Meski begitu, pergerakan orang di dalam wilayah Jabodetabek masih diperbolehkan. "Hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya," tutur Luhut.

Sementara itu, menurut UU Karantina no 6 tahun 2018 pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" bunyi pasal 93 dikutip Lentera Today.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Denda Bagi Pelanggar

Terpisah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat di zona merah Covid-19 yang masih nekat untuk mudik. Dengan sanksi tegas, masyarakat diharapkan bisa mematuhi larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah. "Harus ada sanksi. Peraturan tak akan efektif kalau tidak ada sanksi," katanya.

Agus menyebut, sanksi yang paling mungkin diterapkan adalah pembayaran denda. Masyarakat yang kedapatan mudik harus membayar denda sesuai tarif yang sudah ditetapkan. Setelah membayar denda, maka masyarakat yang kedapatan mudik harus diminta kembali dan tak melanjutkan perjalanan. Namun untuk besaran dendanya, Agus menyerahkan hal itu kepada pemerintah.

"Ganjil genap saja kan sanksinya Rp 500.000. Tinggal tetapkan saja besaran dendanya berapa, yang membuat orang tidak melanggar lagi," kata Agus.

Agus menyebut sanksi yang paling mudah diterapkan dalam kondisi sekarang adalah denda atau perdata. Sementara sanksi pidana dinilai sulit diterapkan karena membutuhkan proses yang panjang. "Kalau pidana pusing lagi lah, cari makan, nyari penjaranya. Sudah denda saja, uangnya mau dipakai apa terserah," katanya.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Dharma Pahla menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak pada perekonomian daerah usai larangan mudik diberlakukan. Sebab, tidak adanya arus mudik ke berbagai daerah bakal semakin mengurangi aktivitas ekonomi di daerah.

"Tentu ekonomi daerah tidak akan bergeliat seperti ketika ada mudik. Saat PSBB mobilitas dalam wilayah saja yang dibatasi. Kalau ini kan, antar provinsi juga," ucap Ariyo.

Tiap tahunnya, tradisi mudik mendorong para perantau atau orang di perkotaan untuk membawa uangnya ke berbagai daerah. Dengan demikian belanja dan konsumsi tidak lagi terpusat di perkotaan atau daerah urban. "Maka konsumsi akan sangat tinggi karena daya beli juga tinggi. Nah, saat tidak ada mudik, aktivitas-aktivitas tersebut tidak ada," ucap Ariyo. Kendati membawa dampak buruk bagi perekonomian daerah, menurut Ariyo, larangan mudik bisa dipahami dan sepadan dengan manfaatnya yaitu mengurangi potensi penyebaran pandemi Corona di daerah. (ist,ins)

WILAYAH YANG SUDAH TERAPKAN PSBB

Provinsi:

- DKI Jakarta (Sejak 10 April)
- Sumatera Barat (Baru diteken 19 April)

Kabupaten/Kota:

- Kab. Bogor (Sejak 15 April)
- Kota Bogor (Sejak 15 April)
- Kota Depok (Sejak 15 April)
- Kota Bekasi (Sejak 15 April)
- Kabupaten Bekasi (Sejak 15 April)
- Kota Tangerang Selatan (Sejak 18 April)
- Kota Tangerang (Sejak 18 April)
- Kabupaten Tangerang (Sejak 18 April)
- Kota Pekanbaru (Sejak 17 April)
- Kota Makassar (Berlaku 24 April)
- Kota Tegal (Berlaku 23 April)
- Kota Bandung (Berlaku 22 April)
- Kab Bandung (Berlaku 22 April)
- Kab Bandung Barat (Berlaku 22 April)
- Kab Sumedang (Berlaku 22 April)
- Kota Cimahi (Berlaku 22 April)
- Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Baru diteken 19 April)
- Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Baru diteken 19 April)
- Kota Surabaya, Jatim (Baru diteken 21 April)
- Kab Gresik, Jatim (Baru diteken 21 April)
- Kab Sidoarjo, Jatim (Baru diteken 21 April)

PSBB DISETUJUI, SURABAYA 'MANUT' PERGUB JATIM



Penutupan beberapa ruas jalan akan menjadi salah satu strategi penerapan PSBB di Surabaya Raya

Surabaya- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diusulkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

"Setelah dilakukan kajian oleh tim teknis, kami menyetujui usulan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Jadi PSBB bisa diterapkan di sana," kata Terawan, dalam situs resmi Kemenkes, Selasa (21/4).

Pasca keputusan ini, pemerintah daerah setempat wajib melaksanakan PSBB dan menyosialisasi secara konsisten pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terbukti terdapat bukti penyebaran

Terkait hal ini, Wali Kota Tri Rismaharini enggan menjelaskan secara gamblang terkait penerapan PSBB di Surabaya. Saat ditanya persiapan PSBB di Surabaya, Risma mengaku sudah melakukan protokol sesuai yang dianjurkan Pemprov Jatim dan Kemenkes. "Sudah seperti yang dilakukan Surabaya katanya, ya," kata Risma saat di dapur umum Balai Kota, Selasa (21/4).

Risma menjelaskan selama pandemi Corona, pihaknya juga menerapkan wajib memakai masker di luar rumah. "Jadi misalkan di pasar harus pakai masker, jaga jarak itu sudah kita lakukan, protokolnya di pasar, di luar pakai masker. Itu sudah kita lakukan juga," jelasnya.

Sebelumnya Pemkot Surabaya siap bila PSBB untuk Surabaya jadi diterapkan. Surat pengajuan PSBB sendiri hari ini dikirim oleh pihak Pemprov Jatim ke Kemenkes. "Ya nanti kita akan mengikuti Pergubnya. Semalam katanya Pergubnya sudah detail. Jadi kita akan mengikuti Pergubnya," kata Risma, Senin (20/4).

Sementara Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser mengatakan Pemkot Surabaya

akan mengikuti semua prosedur dan Pergub yang sedang dibahas di Pemprov Jatim. "Untuk PSBB Kota Surabaya, kami ngikuti semua prosedur yang saat ini lagi dibahas di tingkat gubernur, yang lagi dibahas adalah peraturan gubernur untuk mengatur dua kabupaten dan satu kota," kata M Fikser.

Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan akan secepatnya menyelesaikan skema pemberlakuan PSBB. Sesuai usulan Pemprov ada 14 kecamatan yang layak di berlakukan PSBB dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Sambil menunggu terbitnya Peraturan Gubernur, Pemkab Sidoarjo juga sudah menyiapkan draft Peraturan Bupati untuk pelaksanaan PSBB di Sidoarjo. Sejak pengajuan PSBB kemarin, sejumlah persiapan sudah dilakukan. Seperti pertemuan dengan semua instansi terkait di Sidoarjo, pembahasan dengan OPD (organisasi perangkat daerah), dan sejumlah elemen.

Dalam Perbup terkait pelaksanaan PSBB, akan diatur terkait pembatasan wilayah, pembatasan operasional perusahaan, pasar, dan berbagai kegiatan masyarakat lain. "Dengan diberlakukannya PSBB diharapkan akan memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang nantinya akan menerapkan sanksi kepada masyarakat," katanya.

Pada Senin (20/4) malam Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah mengetahui adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan ketika PSBB di kawasan Surabaya Raya diberlakukan.

"Saya tahu bahwa ada bab tentang sanksi. Saya tahu ada dua pasal. Tetapi akhirnya saya minta tolong kita menunggu. Lebih baik menunggu sampai final," katanya. Khofifah menegaskan, terkait sanksi, masih dalam tahap pembahasan. Dia pun mengaku belum tahu, sanksi yang terbagi ke dalam dua pasal tersebut akan menjadi berapa ayat.

Sementara, Pemkab Gresik yang sebagian wilayahnya masuk dalam penerapan PSBB mengaku siap. "Secara fisik insyaallah kita sudah siap, menunggu Perbup (peraturan bupati) ya. Perbup itu menunggu pergub (Peraturan Gubernur) yang dalam proses finalisasi di Surabaya," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Gresik Tarso. Tarso mengatakan PSBB di Gresik akan dilakukan kepada 8 kecamatan yakni Kebomas, Gresik Kota, Benjeng, Dudusampeyan, Manyar, Sidayu, Menganti, dan Driyorejo. "Jadi PSBB akan diberlakukan di 8 kecamatan. 8 Kecamatan itu, 7 kecamatan masuk zona merah, satu di Kecamatan Gresik Kota, karena merupakan pintu masuk antara Gresik dan Surabaya," ungkap Tarso. Tarso menjelaskan untuk wilayah Kecamatan Gresik Kota dan Kebomas penerapannya akan berlaku mutlak di semua desa yang berada di dua kecamatan (ard,ist)

PEMBATASAN KEGIATAN SAAT PSBB

Daftar kegiatan yang dibatasi



- Sekolah dan tempat kerja diliburkan (pengecualian untuk tempat usaha yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat)
- Semua tempat ibadah ditutup
- Pemakaman bukan karena Covid-19 dibatasi maksimal 20 orang
- Pelarangan Kegiatan/perkumpulan/pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya

Dasar Hukum :

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020
- Permenkes No. 9 Tahun 2020